

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas diketahui bahwa selama tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata rasio efektivitas pemungutan retribusi terminal adalah sebesar 68,90% dengan kriteria kurang efektif dikarenakan rasio efektivitas berkisar antara 60-80%. Hal ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir yakni tahun 2016 hingga tahun 2020 pemerintah (Dinas Perhubungan) Kabupaten Malaka kurang efektif dalam melakukan pungutan retribusi terminal. Hal ini terjadi karena masih lemahnya kualitas sumber daya manusia aparat penagih retribusi terminal sehingga dalam melakukan penagihan retribusi tidak begitu optimal serta belum adanya penataan infrastruktur yang baik dalam terminal untuk menarik investor-investor berupa pelaku usaha kecil sehingga penerimaan retribusi terminal tidak optimal
2. Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi penerimaan retribusi terminal di pemerintah kabupaten Malaka selama lima tahun terakhir yaitu 2016-2020 adalah sebesar 33,07% dengan kriteria kurang efisien. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten Malaka (instansi terkait) dikatakan kurang efisien dalam merealisasikan penerimaan retribusi terminal selama tahun 2016 -2020. Hal ini terjadi karena pemerintah (Dinas Perhubungan) kabupaten Malaka belum mengali secara optimal objek-objek penerimaan retribusi terminal dan hanya mengharapkan penerimaan dari kendaraan angkutan umum (bemo desa) sehingga penerimaan retribusi terminal di kabupaten Malaka tidak begitu

optimal. Dengan penerimaan retribusi yang tidak optimal ini menyebabkan pengeluaran untuk membiayai aparatur dalam melakukan penagihan retribusi pun terbatas sehingga aparatur tidak optimal dalam melakukan penagihan retribusi terminal serta kurangnya pengawasan aparatur dalam lapangan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka terdapat beberapa hal yang penulis rekomendasikan kepada pengambil kebijakan pada Dinas Perhubungan di lingkungan pemerintahan kabupaten Malaka antara lain :

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka perlu menata dan menyediakan berbagai macam fasilitas pendukung terminal seperti sarana dan prasarana untuk pelaku usaha sehingga penerimaan retribusi terminal tidak hanya berasal dari kendaraan angkutan desa melainkan bisa berasal dari biaya sewa fasilitas-fasilitas tersebut sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi terminal secara optimal yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Malaka
2. Pemerintah kabupaten Malaka dalam hal ini instansi terkait (Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka) perlu untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal sehingga bisa meningkatkan biaya operasional bagi aparat pemungut retribusi yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi terminal di kabupaten Malaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alda S Pelealu & Hendrika Manossoh.2016. Analisis Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung.Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No. 03 Tahun 2016.
- Bahri F, M. Samsul. 2011. *Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Surakarta Tahun 2004-2009*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. hlm. 35.
- N. C Maradesa. *at al.*, 2016. Analisis Efektifitas Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 16. No 03. Tahun 2016.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.*Peraturan Pemerintah Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Daerah antara Pusat dan Daerah*.
- Ersita Mega & Inggriani Elim.2016. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara.*Jurnal EMBA* 889Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal.889-897.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Ketiga Salemba Empat, Jakarta.

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Dua*. UPP STIM. YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad.2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE.Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2010. *Perpajakan*. Andi.Yogyakarta.hlm. 132.
- Maryani.*Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Universitas Dehasen. 2012.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta.
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Ruswandi, Arif, 2010. *Tingkat Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang, Jawa Timur*.
- Samosir M. S. 2019. Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. Jurnal Projemen UNIPA Maumere.Vol. 6, No. 1, Januari 2019.

Siahaan & Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sudarsono. 2015. Efektifitas Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Regional Daya (TDR) Kota Makasar.*Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Administrasi.

Sugiono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D). Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 161.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 131 ayat 1 dan 2 tentang Objek Retribusi Terminal.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Retribusi Daerah*. Jakarta.